



PUTUSAN

Nomor 1029/Pdt.G/2020/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir : B. Serbangan, 07 Desember 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX., dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Nurliana Ritonga, SH.MHum., dan Erickson Saut Timbul Purba, SH.,** adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Nurliana Ritonga, SH.MHum& Rekan, yang beralamat kantor di jalan Syech Silau Dusun III Desa Punggulan Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juni 2020, sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir : Pematang Sei Baru, 20 Mei 1975, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tukang Bangunan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Pebruari 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di

Hal 1 dari 17 hal Pts. No.1029/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor 1029/Pdt.G/2020/PA.Kis. tanggal 19 Pebruari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2008, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 68/18/II/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan pada tanggal 18 Pebruari 2008 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama ke Pematang Sei Baru sampai 12 Januari 2020 ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - I. XXXXXXXXXX, Laki laki, umur 11 tahun ;
 - II. XXXXXXXXXX, Laki laki, 10 tahun ;
 - III. XXXXXXXXXX, Laki laki, 2 tahun 5 bulan ;
4. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun dan damai selama 10 (sepuluh) tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup memberi uang belanja ;
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti bilang kalau Penggugat lonte dan keturunan tak elok atau keturunan tak bagus ;
 - c. Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah ;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Januari 2020, pada saat itu Penggugat meminta tambahan uang belanja, tetapi Tergugat malah marah sehingga terjadilah pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan bersama, tidak satu rumah dan tempat tidur lagi, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal dirumah sebagaimana alamat tersebut diatas ;

Hal 2 dari 17 hal Pts. No.1029/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa dan menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya untuk mendamaikan serta merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan juga Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi, Penggugat dan Tergugat memilih Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H. sebagai mediatornya, yang kemudian oleh Majelis Hakim ditunjuk untuk melakukan usaha damai di luar persidangan, oleh Ketua Majelis menetapkan penunjukan mediator pada tanggal 23 Juni 2020, namun usaha damai dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dimulai dengan dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dimulai dengan dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita

Hal 3 dari 17 hal Pts. No.1029/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sidang perkara ini. Untuk ringkasnya jawaban Tergugat dapat diuraikan sebagai berikut

1. Bahwa nomor 1, 2 dan 3 benar
2. Bahwa nomor 4 huruf a tidak benar Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat; buktinya Tergugat dapat memenuhi kebutuhan sandang dan pangan keluarga;
3. Bahwa nomor 4 huruf b tidak benar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti bilang kalau Penggugat lonte dan keturunan tak elok atau keturunan tak bagus, Tergugat hanya berkata kamu ini menggatal saja disebabkan sering keluar rumah secara diam-diam;
4. Bahwa nomor 4 huruf c tidak benar Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah, tapi Penggugat yang keluar dari rumah kediaman bersama;;
5. Bahwa nomor 5 tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 12 Januari 2020, disebabkan Penggugat meminta tambahan uang belanja kepada Tergugat, yang benarnya Tergugat menyuruh Penggugat membesihkan rumah yang kotor;
6. Bahwa benar kedua belah pihak keluarga masih tetap berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat sangat keberatan berpisah dengan Penggugat, demi masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 14 JULI 2020 yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini. Untuk ringkasnya jawaban Tergugat dapat diuraikan sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat terdahulu, dimana Penggugat tetap pada alasan-alasan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat dalam gugatan Penggugat terdahulu;
2. Bahwa kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara ini dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya dengan amar sebagai berikut:

Hal 4 dari 17 hal Pts. No.1029/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);

- Membebankan biaya perkara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa terhadap reflik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan duplik secara yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini. Untuk ringkasnya jawaban Tergugat dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat dalam jawabannya tetap berpendirian teguh mempertahankan dalil-dalil jawaban Tergugat;

2. Bahwa Tergugat sangat keberatan berpisah dengan Penggugat, demi masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan, nomor 68/18/III/2008, tanggal 18 Pebruari 2008 yang telah bermeterai, dan dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P.);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikarunia 3 orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran



disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar dan mengusir Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih kurang 6 bulan lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD ,pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Uwak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikarunia 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar dan mengusir Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih kurang 6 bulan lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX, umur 50 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikarunia 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara tertulis tetap pada pendiriannya yaitu tetap pada permohonan dan replik Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan, sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan menyatakan pada dasarnya tidak mau bercerai dengan Penggugat, sesuai dengan jawaban dan duplik Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki pasal 145 RBg dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Nurliana Ritonga, SH.MHum., dan Erickson Saut Timbul Purba, SH.,** adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Nurliana Ritonga, SH.MHum& Rekan, yang beralamat kantor di jalan Syech Silau Dusun III Desa Punggulan Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juni 2020,, karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat seperti tertulis dalam identitas gugatan, dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal 7 dari 17 hal Pts. No.1029/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri, maka gugatan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan domisili Penggugat yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kisaran, dan berdasarkan jawaban Tergugat, Tergugat juga tidak keberatan perkara *a quo* diperiksa di Pengadilan Agama Kisaran. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg *Juncto* Pasal 1868 KUHPdata, telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Penggugat adalah pihak yang

Hal 8 dari 17 hal Pts. No.1029/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *junctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menganjurkan Penggugat dan Tergugat dalam setiap tahapan persidangan agar keduanya kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil. Bahkan upaya mediasi, sebagaimana dihendaki Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan bersama mediator yang telah ditunjuk atas kesepakatan para pihak dari Hakim Pengadilan Agama kisaran yang bernama Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H. akan tetapi berdasarkan laporannya, mediasi gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka sesuai laporan hakim Mediator tertanggal 23 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan tanggapannya dalam jawaban dan duplik, yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dan membantah/menolak sebagian lainnya, Tergugat mengakui secara murni atas dalil gugatan pada angka 1, 2 dan 3, sedangkan terhadap dalil-dalil gugatan lainnya yaitu dalil gugatan pada angka 4 huruf a tidak benar Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat; buktinya Tergugat dapat memenuhi kebutuhan sandang dan pangan keluarga, angka 4 huruf b tidak benar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti bilang kalau Penggugat lonte dan keturunan tak elok atau keturunan tak bagus, Tergugat hanya berkata kamu ini menggatal saja, disebabkan sering keluar rumah secara diam-diam, angka 4 huruf c tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi

Hal 9 dari 17 hal Pts. No.1029/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 12 Januari 2020, disebabkan Penggugat meminta tambahan uang belanja kepada Tergugat, yang sebenarnya Tergugat menyuruh Penggugat membesihkan rumah yangb kotor, angka 5 tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 12 Januari 2020, disebabkan Penggugat meminta tambahan uang belanja kepada Tergugat, yang sebenarnya Tergugat menyuruh Penggugat membesihkan rumah yangb kotor, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tanggal 12 Januari 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Tergugat sangat keberatan berpisah dengan Penggugat, demi masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat membantahnya dan tetap berpendirian pada dalil gugatan. Oleh karena itu, terhadap dalil-dalil tersebut Penggugat wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan murni Tergugat, maka berdasarkan Pasal 311 RBg dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti. Sedangkan terhadap pengakuan berkualifikasi Tergugat dan bantahannya masing-masing, maka berdasarkan Pasal 283 RBg kepada kedua belah pihak dibebankan wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P. serta alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehubungan pertimbangan untuk itu telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan tentang kewenangan mengadili perkara *a quo*, maka terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat (XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut mengenai posita gugatan pada angka 4 huruf (a), angka 6 dan angka 7 yaitu

Hal 10 dari 17 hal Pts. No.1029/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar dan mengusir Penggugat, dan tentang telah berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan keduanya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., dan keterangan 2 orang saksi Penggugat terbukti fakta peristiwa/kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, Tergugat telah menikah tanggal 17 Pebruari 2008 dan telah dikarunia 3 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2016 karena keduanya sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar dan mengusir Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
4. Bahwa selama pisah keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melumpuhkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat dan guna menguatkan jawaban Tergugat untuk tidak bercerai dengan Penggugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 orang Tergugat (XXXXXXXXXX) tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 1 orang saksi Tergugat(XXXXXXXXXX) tersebut mengenai jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan pada angka 4 dan

Hal 11 dari 17 hal Pts. No.1029/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 dan 6 yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, bahwa saksi dan tentang telah berpisah rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa 1 orang saksi Tergugat (XXXXXXXXXX) tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat mengenai jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan pada angka 4 dan 5, yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran walaupun saksi tidak tahu penyebabnya dan tentang telah berpisah rumah Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi mengenai jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan angka 4 huruf (a) dan huruf (b) adalah tidak tahu; terhadap jawaban pada angka 6 tentang tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, maka relevansi keterangan saksi tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat secara materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg, akan keterangan saksi Tergugat tidak menguatkan jawaban dan kehendak Tergugat yang ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, karena saksi tersebut malah telah menjelaskan tentang akibat ketidakharmonisan, yakni adanya pisah tempat kediaman;

Menimbang, bahwa sehubungan saksi Tergugat hanya satu orang dan keterangannya tidak dapat melumpuhkan nilai kekuatan bukti-bukti Penggugat, maka bukti saksi Tergugat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, Tergugat telah menikah tanggal 17 Pebruari 2008 dan telah dikarunia 3 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2016 karena keduanya sering bertengkar

Hal 12 dari 17 hal Pts. No.1029/Pdt.G/2020/PA.Kis.



disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar dan mengusir Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

4. Bahwa selama pisah keduanya sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri;

5. Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: "mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka"

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh dari barometer kerukunan karena keduanya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan yang disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga,

Hal 13 dari 17 hal Pts. No.1029/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering berkata kasar dan mengusir Penggugat, apalagi diantara keduanya telah pisah rumah sejak bulan Januari 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama itu keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga keadaanya telah tidak memiliki unsur-unsur keharmonisan dan jauh dari barometer kerukunan, seperti yang tengah dialami Penggugat terhadap Tergugat, maka patut dinyatakan rumah tangga yang demikian telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*). Keadaan tersebut terlihat pula di dalam persidangan, yang mana selama proses persidangan berlangsung di antara keduanya tidak nampak adanya komunikasi yang konstruktif bagi terbinanya harmonisasi hubungan rumah tangga mereka, demikian pula tidak nampak rekahan senyum dan kehangatan tegur sapa yang terlontar kedua belah pihak sebagaimana lazimnya suami istri, bahkan Penggugat berkali-kali mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak menafikan kehendak Tergugat yang ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, Majelis Hakim menilai berdasarkan sikap masif Penggugat untuk bercerai bahwa pada diri Penggugat sudah kehilangan salah satu unsur penting dalam perkawinan, yaitu hilangnya ikatan batin Penggugat kepada Tergugat. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, sebagaimana yang tengah dialami Penggugat terhadap Tergugat saat ini, maka patut dinyatakan cita ideal dalam kehidupan rumah tangga di antara mereka tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan persepsi mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara mereka, namun faktanya perselisihan dan pertengkaran tersebut memang benar adanya dalam kehidupan rumah tangga mereka, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, di dalam masalah perceraian tidak dicari siapa sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran,

Hal 14 dari 17 hal Pts. No.1029/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenting adalah rumah tangga kedua belah pihak sudah terjadi pecah yang tidak mungkin lagi diperbaiki;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah dan rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fiqhyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal 15 dari 17 hal Pts. No.1029/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh kaml Drs. JAHARUDDIN.sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD RASIDI, S.H.,M.H. dan Mhd TAUFIK,, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmintaito, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat/Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. JAHARUDDIN.

Hakim Anggota,

Drs. H. AHMAD RASIDI, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Mhd. TAUFIK, S.Hi.

Hal 16 dari 17 hal Pts. No.1029/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Panitera Pengganti,

Rosmintaito, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000.00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10 .000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal Pts. No.1029/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)